

Demokrasi, Kepemimpinan, dan Psikologi Moral

Indro Adinugroho¹

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Abstract

As a young democratic country, Indonesia needs various studies and experiences related to implementation of healthy democracy. Referring to psychological principle, decade long experience living in the Dark Age (new order regime) could become a nightmare or even traumatic experience for many Indonesians. In the context of Indonesia as a state, the traumatic event is not just experienced by individual, but also groups, organizations and civil society. Therefore, Indonesia needs numerous empirical supports to enhance its democratic condition. Moral psychology is considered as the empirical aspect that suitable in analyzing various political and democracy issues in Indonesia. Moral psychology is focusing its studies on human judgment related to right (correct) and wrong (false). This study is truly become empirical donation as an attempt to search political leader with democratic leadership as the trait. Comprehensive study in moral psychology could provide clear explanation for many political issues and also helping citizens to decide their political action for Indonesia.

Keywords: democracy, emotion, moral psychology, politics, value

Pengantar

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan kekayaan alam yang melimpah. Berbagai kekayaan alam dimiliki oleh Indonesia dari destinasi wisata, barang tambang, sumber minyak mentah, ekosistem laut hingga kekayaan budaya. Namun, sebagai negara kaya yang dilimpahi dengan berbagai kekayaan alam dan manusia yang melimpah, Indonesia masih membutuhkan banyak pengalaman dan pelajaran dalam menjalani hidup berdemokrasi.

Usia perjalanan demokrasi yang menyentuh angka 18 tahun merupakan usia belia yang membutuhkan banyak pendampingan dan bimbingan dari berbagai pihak. Apalagi ditambah dengan

pengalaman masa lalu yang mungkin cenderung kelam bagi sebagian kelompok masyarakat. Fakta-fakta ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak guna mencapai demokrasi yang sehat dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Secara konkret, Indonesia membutuhkan sebuah strategi besar yang efektif untuk diaplikasikan oleh Pemerintah dalam era demokrasi yang masih belia.

Pengunduran diri Presiden Soeharto merupakan titik balik bagi Indonesia untuk menapaki babak baru hidup bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang betul-betul mengamalkan prinsip demokrasi melalui Pancasila. Berbagai perubahan dilakukan oleh Pemerintah guna memenuhi perwujudan demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945, salah

¹ Korespondensi mengenai artikel ini dapat dilakukan melalui: indro.adinugroho@atmajaya.ac.id

satunya adalah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah dan kepala Daerah yang dilakukan secara langsung. Semua perubahan ini telah tertuang dalam Undang-undang (UU) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan umum secara langsung merupakan perwujudan paling konkret pada era demokrasi dimana para calon pemimpin politik diberikan ruang presentasi untuk menampilkan gagasan, visi, misi dan rencana yang akan dilakukan ketika menjadi pemimpin politik yang bertugas melayani rakyat. Dalam pemilihan langsung, rakyat diberikan wewenang yang sangat besar, yaitu memilih calon pemimpin politik. Selain itu, kewenangan penuh juga diberikan Pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemilu langsung sesuai dengan UU No. 22 tahun 2007, tentang penyelenggaraan pemilu merupakan perubahan yang sangat signifikan dari runtuhnya era orde baru.

Perwujudan demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan munculnya berbagai organisasi masyarakat dan partai politik baru, baik yang memiliki fungsi sebagai pembela kepentingan masyarakat maupun golongan tertentu. Namun, di balik itu semua, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul adalah esensi utama dari demokrasi (Weber, 2010). Di Indonesia, kebebasan tersebut dijamin melalui UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Esensi demokrasi mengenai kebebasan mungkin memiliki berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif, namun dalam hal ini negara harus hadir untuk menjaga dan memfasilitasi kelompok masyarakat dalam memaknai kebebasannya. Dalam konteks ini, jika negara harus memberikan

punishment, maka itu adalah perwujudan dari tindakan hukum pidana atau perdata bukan aksi yang membatasi kebebasan yang merupakan hak dari setiap warga negara. Artinya dalam demokrasi masyarakat bebas untuk menyuarakan aspirasinya terkait apapun, namun tetap berada dalam koridor regulasi yang jelas. Disinilah fungsi militer dan polisi, yaitu menjaga koridor ini tetap berdiri tegak.

Dalam kajian psikologi, perubahan perilaku manusia akan terjadi karena adanya interaksi yang kompleks antara pikiran, emosi dan nilai individu (Fiske & Taylor, 2008). Kompleksitas yang terjadi pada manusia inilah yang juga menyebabkan Psikologi tidak mampu membuat rumus-rumus perilaku yang sah. Pikiran berada pada tataran pengetahuan, emosi merujuk kepada keadaan psikologis yang muncul karena adanya objek emosi yang spesifik (Russell, 2003), sedangkan nilai adalah paket informasi yang dijadikan oleh manusia sebagai panduan dalam berbagai konteks aktivitas (Schwartz, 2012).

Ketika berbicara mengenai transformasi dari kondisi lama ke kondisi baru, tentu saja penyesuaian perilaku adalah hal paling pokok yang dialami oleh manusia. Dalam konteks transisi dari orde baru ke demokrasi, transformasi perilaku yang paling terlihat adalah pembatasan wewenang pemerintah dan penambahan wewenang rakyat. Tentu saja transformasi signifikan ini membutuhkan manajemen perilaku politik yang mapan dan komprehensif. Artinya, ada kebutuhan perilaku yang berbeda yang harus ditampilkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dan Pemerintah sebagai fasilitator yang membawa kemaslahatan bagi rakyat.

Guna memenuhi kebutuhan yang baru dalam era demokrasi, dibutuhkan pemimpin politik yang memiliki kemampuan, sikap, nilai dan perilaku yang khusus.

Ketika berbicara demokrasi, maka kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan politik demokratis atau *democratic political leadership* (Lewin, 1950; Weber 2010; Beerbohm, 2015). Menurut salah seorang psikolog ternama Kurt Lewin (1950), kepemimpinan demokratis memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan kepemimpinan otoriter terutama dalam aspek pengambilan keputusan akan kebijakan; proses penetapan keputusan; kebebasan untuk masuk ke dalam bagian apapun sesuai dengan kapasitasnya serta proses penetapan keputusan dimana semua pihak dapat menyampaikan aspirasinya. Esensi dari berbagai perbedaan ini adalah tentang peran serta seluruh anggota dalam menentukan sebuah keputusan. Jika tipe kepemimpinan otoriter, keputusan hanya dikuasai oleh satu pihak, pada tipe kepemimpinan demokratis, ada proses kolaborasi dan diskusi sebelum keputusan diambil oleh pimpinan. Intinya, kepemimpinan yang demokratis mampu menjadi konsep yang memunculkan kerja sama dan kolaborasi antar semua pihak dalam sebuah aktivitas pengambilan keputusan. Guna memenuhi kebutuhan ini, Indonesia dituntut untuk memiliki pemimpin politik dengan kapasitas yang khusus. Dalam aspek inilah Psikologi sebagai salah satu cabang ilmu perilaku memiliki kontribusi untuk mengidentifikasi dan melakukan asesmen terhadap calon pemimpin politik yang sesuai untuk era demokrasi.

Pemimpin politik memiliki fungsi mengambil keputusan terbaik yang memiliki implikasi pada rakyat di suatu negara. Artinya, keputusan si pemimpin akan baik-buruk dan benar-salah merupakan aspek perilaku yang fundamental. Keputusan ini disebut juga sebagai keputusan moral (Haidt, 2001). Dalam berbagai kajian psikologi moral ada dua aspek penting yang mendasari keputusan moral, yaitu

nilai moral (Haidt, 2001; 2003) dan emosi moral (Cohen, Wolf, Panter & Insko, 2011). Nilai moral merujuk kepada seperangkat informasi yang digunakan manusia sebagai panduan pengambilan keputusan moral. Jika nilai moral merujuk kepada informasi yang berada pada tataran kognisi, maka emosi moral merujuk kepada keadaan psikologis manusia yang muncul karena adanya objek emosi yang hadir (Russell, 2003; Cohen et al., 2011). Emosi moral akan bekerja sebagai mekanisme penanda perilaku setelah individu melakukan sebuah aksi (Tangney & Salovey, 2010; Cohen et al., 2011). Psikologi moral adalah aspek psikologis yang sangat signifikan untuk menuju pada prinsip utama demokrasi, yaitu "*majority rule, minority right*". Melalui dua aspek psikologis ini, psikologi harus mampu memberikan sumbangsih dalam mendukung usia demokrasi Indonesia yang masih belia sehingga tumbuh secara sehat.

Pemimpin Politik, Partai dan Demokrasi

Dalam era demokrasi, kehadiran seorang pemimpin yang mampu mendengar dan memfasilitasi kerja sama dengan rakyat adalah sebuah keharusan. Begitu juga di Indonesia, negara kepulauan terbesar dengan kekayaan alam yang melimpah. Sebagai negara demokrasi yang berusia belia, kehadiran pemimpin yang demokratis adalah keharusan.

Namun, pengalaman kelam, bahkan traumatis bagi sekelompok masyarakat pada era orde baru seakan menjadi mimpi buruk yang terus membayangi. Pada era orde baru, sangat terasa bahwa fungsi partai politik tidak menjadi sebuah institusi yang menjalankan fungsinya untuk mencetak kader-kader politik yang mumpuni. Partai politik (parpol) saat itu hanya menjadi alat kekuasaan yang digunakan oleh sebagian elit untuk memenuhi ambisi politiknya. Bahkan hingga saat

ini, penyakit yang mendera parpol masih dialami sebagian besar parpol di Indonesia.

Survei yang dilakukan *Lingkaran Survei Indonesia* (LSI) bersama *Saiful Mujani Research & Consulting* (SMRC) menunjukkan bahwa eksistensi partai politik di Indonesia seakan menjadi institusi yang dipandang negatif oleh rakyat (Hanan, 2015). Namun, suka tidak suka, ketika berbicara tentang demokrasi maka parpol adalah institusi utama penggerak demokrasi (Hofmeister & Grabow, 2011). Di Indonesia, fungsi utama partai politik telah tertuang dalam Undang-undang (UU) No.2 tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU No.2 tahun 2008. Dalam UU tercantum dengan jelas bahwa partai politik memiliki fungsi menyiapkan kader-kader politik melalui rekrutmen dan pendidikan politik.

Guna menjalankan fungsi kaderisasi, sudah selayaknya partai politik melakukan aktivitas pendidikan politik. Aktivitas ini juga tertuang dalam UU No. 2 tahun 2011. Melalui fungsi ini partai politik tidak hanya berperan sebagai institusi yang merekrut calon pemimpin politik, namun juga “sekolah” yang memberikan seperangkat pendidikan sebagai bekal bagi kader jika nanti ia dicalonkan dan menjadi pejabat negara. Artinya, tidak hanya teori-teori mengenai sistem tata negara dan politik yang harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan politik, namun teori-teori tentang moral, perilaku manusia dan etika menjadi aspek penting yang harus masuk dalam cakupan pendidikan politik. Ketiga cakupan teoritis ini adalah bekal bagi individu (politisi) dalam menentukan keputusan yang membawa manfaat bagi rakyat banyak. Ketika fungsi pendidikan politik dapat berjalan baik, maka partai akan memiliki kader-kader mumpuni yang siap untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia.

Ketidakmampuan parpol untuk menghasilkan kader yang mumpuni sangat membutuhkan reformasi. Reformasi yang menyeluruh dalam berbagai aspek, mulai dari sistem tata kelola partai, pendanaan, kaderisasi pengurus partai, visi dan misi serta rekrutmen anggota partai politik. Mengapa pembenahan harus dilakukan? Dalam negara maju dengan sistem demokrasi pun peran partai adalah institusi formal yang menggerakkan roda pemerintahan (Hofmeister & Grabow, 2011). Secara riil, sebenarnya parpol memiliki peran yang begitu mulia, yaitu memfasilitasi putra-putri terbaik bangsa yang ingin mengabdikan dirinya untuk membangun Indonesia melalui dunia politik. Namun, fungsi yang mulia ini terkadang sering disalahartikan oleh oknum politisi. Mari kita bayangkan sebuah parpol yang mampu menghasilkan kader dan pemimpin politik yang berkualitas. Apa keuntungan yang akan didapat? Tentu saja bukan keuntungan finansial, namun keuntungan yang didapat adalah keuntungan sosial psikologis, yaitu kepercayaan dan *attachment* dari rakyat. Ketika dua aspek ini telah dipegang, maka jelas bahwa posisi *ruling party* atau partai pemenang pemilu telah di depan mata.

Melaui tulisan ini, Penulis menawarkan sebuah tinjauan empiris yang dapat menjadi masukan bagi parpol dan seluruh lapisan *stakeholders* demi terciptanya kondisi demokrasi yang lebih sehat. Kondisi ini akan tercapai ketika pemimpin politik yang mau mendengar dan mampu menciptakan “kolaborasi” hadir untuk melayani rakyat. Karakteristik kepemimpinan demokratis yang dibutuhkan negara demokrasi sangat erat kaitannya dengan posisi moral individu yang bertindak sebagai pemimpin. Dalam negara demokrasi, pemimpin harus bisa melihat bahwa aspirasi seluruh lapisan masyarakat harus dihargai sebagai sebuah proses politik yang benar bukan sebagai

sesuatu yang salah dan harus dieliminasi. Pemimpin juga harus memiliki nilai yang sejalan dengan rakyat mengenai kelompok-kelompok mana yang memiliki maksud memecah-belah dan kelompok-kelompok mana yang memiliki maksud persatuan. Kedua hal ini tidak dapat dianalisis dengan rumus pasti di atas kertas, disinilah letak dari keberfungsian nilai moral tersebut. Artinya, nilai moral demokratis harus diasah sejak kader menjalani pendidikan politik di parpol.

Pembahasan

Moral, Pemimpin dan Keputusan bagi Rakyat Indonesia

Di dalam konsep demokrasi Amerika, elemen demokrasi direpresentasikan oleh kehadiran dua ideologi partai politik, yaitu ideologi *liberal* yang diwakili oleh Partai Demokrat dan ideologi *conservative* yang diwakili oleh Partai Republik (Carney, Jost, Gosling & Potter, 2008). Setiap ideologi memiliki perangkat pemikiran, sikap dan perilaku yang berbeda secara signifikan dalam berbagai isu.

Misalnya, terkait isu homoseksualitas di Amerika, individu dengan ideologi *conservative* pasti menunjukkan sikap penolakan keras dan ideologi *liberal* menunjukkan penerimaan karena pada dasarnya manusia diciptakan sama. Berbagai isu lain yang menjadi isu krusial antara kelompok *liberal* dan *conservative* antara lain pajak, hubungan luar negeri, aborsi, hukuman mati, pendidikan, energi serta kebijakan ekonomi. Perbedaan ideologi mengakibatkan perbedaan keputusan benar-salah yang dibuat oleh individu.

Jonathan Haidt, salah seorang psikolog moral dari *University of Virginia* menemukan lima dimensi nilai moral masyarakat Amerika dengan ideologi politik *liberal* dan *conservative*. Nilai moral

akan berfungsi bagi individu sebagai panduan dalam membuat keputusan moral. Temuan tentang nilai moral adalah sebuah usaha memahami mengapa kedua kelompok politik di Amerika selalu berbeda dalam hal pandangan sosial-politik (Haidt, 2001).

Selain nilai, salah satu kajian psikologi moral yang berkontribusi signifikan adalah emosi moral. Dalam konteks emosi moral, objek emosi yang dapat hadir dan berpengaruh adalah aktivitas individu (pribadi) yang mengandung unsur "kesalahan". Dua macam emosi moral, yaitu emosi malu (*shame*) dan emosi bersalah (*guilt*; Cohen et al., 2011). Jika nilai adalah informasi yang hadir dan dijadikan panduan individu dalam membuat keputusan, emosi moral bertindak sebagai *self-regulator*, yaitu elemen psikologis yang berkontribusi menentukan aktivitas manusia (perilaku). Emosi moral akan muncul setelah individu melakukan sebuah tindakan (*action*). Tindak lanjut evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukannya akan muncul karena pengaruh emosi moral (Tangney & Salovey, 2010). Kehadiran emosi moral merupakan aspek psikologis yang sangat penting untuk menentukan perilaku manusia di masa depan. Dalam kaitannya dengan isu politik, emosi moral adalah konstruk psikologis yang harus hadir sebagai panduan perilaku politik, terutama seorang pemimpin politik yang harus menjadi *role model* bagi rakyat.

Nilai dan emosi moral menjadi dua konstruk psikologis yang harus berinteraksi dalam pribadi para pemimpin politik. Jika kajian-kajian politik pada umumnya didominasi pada kajian tentang sistem tata negara; UU yang mengatur kehidupan berpolitik, maka kajian psikologi politik dalam artikel ini berusaha menyorot dari perspektif yang berbeda, yaitu manusia dan perilaku.

Dalam berpolitik di era demokrasi, negara tidak hanya membutuhkan individu-individu yang berpartisipasi dalam parpol dan menjadi politisi, namun juga politisi-politisi yang memiliki nilai dan emosi moral sejalan dengan kepentingan rakyat. Negara ini sudah terlalu banyak memiliki politisi yang mumpuni, namun masih memiliki sedikit politisi yang memiliki nilai dan emosi moral yang mengarah kepada kepentingan terbaik rakyat. Hal ini ditandai dengan berbagai peristiwa pidana yang melibatkan para politisi seperti korupsi, penyuapan, pungutan liar dan pencucian uang. Berbagai peristiwa ini adalah indikator dari absennya nilai dan emosi moral yang seharusnya melekat pada mereka. Kajian-kajian terhadap isu politik dan demokrasi sudah selayaknya mempertimbangkan kondisi psikologis manusia sebagai usaha mengidentifikasi “makhluk politik” yang memang ingin mengabdikan dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Psikologi Moral dan Usaha Mencari Pemimpin Politik

Bagaimana kajian psikologi moral dapat berkontribusi terhadap kondisi demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia? Kajian mengenai psikologi terkait moral sangat erat kaitannya dengan individu dan kelompok. Ketika berbicara mengenai demokrasi, seharusnya mayoritas kajian lebih ditekankan kepada aspek manusia, bukan kepada sistem tata negara yang terberi. Manusia adalah agen yang membuat, mengembangkan dan menjalankan sistem demokrasi. Kajian yang komprehensif tentang manusia demokrasi akan semakin mendekatkan negara kepada kondisi demokrasi yang sehat. Suatu kondisi tidak akan pernah disebut dengan demokrasi ketika tidak ada aktivitas manusia yang merepresentasikan kondisi tersebut. Dalam hal ini, psikologi moral adalah

cabang ilmu psikologi yang tepat untuk berusaha untuk mengkaji, memahami dan mengidentifikasi perilaku manusia dalam alam demokrasi Indonesia yang belia.

Dua aspek psikologis tentang moral yang akan difokuskan pada artikel ini adalah nilai moral dan emosi moral. Nilai merujuk kepada informasi yang letaknya pada tataran kognisi, sedangkan emosi merupakan aspek psikologis yang muncul ketika ada objek emosi yang hadir (Fiske & Taylor, 2008). Salah seorang psikolog moral, Jonathan Haidt (2001) melakukan penelitian dan menemukan bahwa nilai moral akan bekerja pada fungsi kognisi manusia bahkan ketika manusia berpikir secara otomatis dan tanpa usaha. Pendekatan ini disebut dengan *social intuitionist model* (SIM). Pendekatan SIM memfokuskan pada aktivitas berpikir manusia yang tidak sepenuhnya rasional. Pandangan ini berpendapat bahwa sebagian besar kinerja kognitif manusia dilakukan secara otomatis atau intuisi. Proses berpikir otomatis cenderung tidak membebani dan membuat manusia lelah dibandingkan dengan proses berpikir rasional. Dalam konteks pembuatan keputusan moral, terkadang individu secara cepat menggunakan nilai moral yang dianutnya sebagai landasan pengambilan keputusan tersebut. Jika dikaitkan dengan konteks pemimpin politik, sangat jelas bahwa seringkali pemimpin politik harus menggunakan intuisinya untuk mengambil sebuah keputusan dilematis, namun memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Disinilah pentingnya nilai moral manusia sebagai aspek psikologis yang mempengaruhi sebuah keputusan.

Apakah nilai dan emosi moral dapat teridentifikasi secara komprehensif? Ataukah hanya aspek yang diwacanakan? Graham, Nosek, Haidt, Iyer, Koleva dan Ditto (2011) telah berhasil mengembangkan instrumen pengukuran psikologis bernama

Moral Foundations Questionnaire (MFQ) yang mampu mengidentifikasi nilai moral individu. Nilai moral yang dapat diidentifikasi adalah *harm; fairness; ingroup; authority* dan *purity*. Nilai *harm* adalah nilai moral yang terkait dengan rasa kemanusiaan, seperti prinsip dasar manusia bahwa membunuh adalah hal yang salah karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Nilai *fairness* adalah nilai moral yang terkait dengan prinsip keadilan, misalnya perilaku korupsi adalah tindakan yang salah karena memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Nilai *ingroup* merujuk pada nilai moral yang terkait dengan keterikatan atau afiliasi dengan kelompok tertentu. Misalnya, seorang politisi tetap mendukung pasangan calon A dalam pemilihan umum padahal telah menjadi tersangka korupsi karena partai yang menjadi afiliasinya adalah pendukung utama pasangan calon tersebut. Nilai *authority* merujuk kepada nilai moral yang terkait dengan kekuasaan dan penguasa yang terlibat dengan individu. Misalnya, A akan mempertahankan pendapat B yang adalah atasannya meskipun telah terbukti salah. Nilai moral terakhir adalah nilai *purity* yang terkait dengan aspek kesucian. Melalui konsep nilai moral, Haidt (2001) melihat bahwa segala konflik yang melibatkan individu maupun kelompok disebabkan karena adanya perbedaan nilai moral yang diyakini. Artinya, manusia bukan berbeda secara lahiriah, namun perbedaan itu hanya ada dalam tataran nilai yang dianutnya.

Lantas, bagaimana mengaplikasikan teori dan kerangka konseptual nilai moral dalam konteks politik dan demokrasi di Indonesia? Dalam berbagai kajian pengukuran psikologi, berbagai aspek psikologis manusia dapat diukur melalui berbagai metode dan instrumen pengukuran. Graham et al. (2011) telah mengembangkan

alat ukur yang mampu mengidentifikasi lima nilai moral tersebut. Instrumen ini telah digunakan dalam konteks masyarakat Amerika guna mengidentifikasi nilai moral pada kelompok ideologi *liberal* dan *conservative*. Sayangnya, perbedaan budaya dan ideologi politik antara Amerika dan Indonesia menjadi penghambat adaptasi instrumen psikologis tersebut di Indonesia. Hambatan ini memiliki konsekuensi bahwa kerangka teori tentang lima nilai moral tersebut belum dapat diaplikasikan di Indonesia. Namun, hambatan ini seharusnya tidak menjadi halangan psikolog dan para praktisi psikologi di Indonesia untuk mengembangkan kerangka teori lanjutan melalui berbagai studi serta instrumen baru yang mampu mengidentifikasi nilai moral masyarakat Indonesia. Dengan kehadiran instrumen tersebut, nantinya diharapkan menjadi sebuah terobosan yang mampu melengkapi asesmen kandidat-kandidat pemimpin politik di Indonesia.

Selain nilai moral, eksistensi dari emosi moral juga dapat dijelaskan secara komprehensif. Emosi moral harus hadir sebagai aspek psikologis yang berkolaborasi dengan nilai moral menentukan perilaku (moral) manusia. Emosi memiliki fungsi sebagai *marker* atau penanda tindak lanjut perilaku apa yang akan ditampilkan oleh manusia. Dalam kajian psikologi moral, terdapat dua emosi yang disebut sebagai emosi moral, yaitu malu (*shame*) dan bersalah (*guilt*; Tangney & Salovey, 2010; Cohen et al., 2011). Kedua emosi ini merupakan emosi yang berbeda dalam makna konteks. Emosi malu dimaknai sebagai emosi yang memiliki konteks publik, artinya emosi ini akan muncul ketika individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Berbeda dengan emosi malu, emosi bersalah adalah emosi yang dimaknai dalam konteks privat atau pribadi. Artinya emosi ini akan muncul ketika individu melakukan proses refleksi

atas perilaku yang telah dilakukannya. Emosi moral menjadi isu besar karena kemampuannya untuk memprediksi perilaku manusia dengan hadirnya dua proses psikologis, yaitu, evaluasi dan intensi. Evaluasi merujuk pada proses kognisi yang dilakukan individu untuk melihat kembali apa yang telah dilakukannya, sedangkan intensi adalah kecenderungan perilaku yang ditampilkan individu.

Jika nilai moral dapat diukur melalui MFQ sebagai salah satu instrumen psikologisnya, maka emosi moral pun dapat diidentifikasi melalui sebuah instrumen psikologis. Salah satu instrumen yang dikembangkan oleh Cohen et al. (2011) bernama *Guilt and Shame Proneness Scale* (GASPS). GASPS adalah instrumen psikologis dengan bentuk kuesioner, diisi secara mandiri oleh partisipan dan mampu memberikan skor yang menjelaskan empat dimensi emosi moral dan kecenderungan perilaku yang ditampilkan. Terdapat empat aspek yang diidentifikasi dalam kuesioner ini, yaitu *guilt-negative behavior evaluation* (NBE); *guilt-repair* (R); *shame-negative self evaluation* (NSE) dan *shame-withdraw* (W). Aspek NBE dan NSE merepresentasikan aspek psikologis yang merujuk kepada evaluasi pribadi individu, sedangkan aspek R dan W menggambarkan aspek intensi berperilaku (*action tendencies*). Empat aspek emosi moral ini adalah usaha untuk mengidentifikasi secara detil mengenai emosi moral dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan individu. Hingga saat ini, instrumen GASPS masih dikaji oleh penulis untuk diuji kesahihannya dalam mengidentifikasi emosi moral dalam konteks masyarakat Indonesia.

Instrumen psikologis GASPS dan MFQ menunjukkan sebuah bukti empiris bahwa emosi dan nilai moral bukanlah konsep yang bersifat retorika. Semuanya dapat diidentifikasi secara jelas dan memiliki

kontribusi yang signifikan untuk mempengaruhi perilaku manusia (keputusan moral). Dalam konteks manusia dalam era demokrasi, kedua aspek ini sangat jelas memiliki kontribusi dalam peningkatan kualitas demokrasi terutama dalam hal mencari pemimpin politik yang berfungsi sebagai negarawan, yaitu seorang pemimpin politik yang demokratis (Weber, 2010). Pemimpin politik yang demokratis adalah pemimpin politik yang mampu melihat kepentingan rakyat sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik. Meskipun kerangka konseptual nilai dan emosi moral tidak sepenuhnya mampu memberikan prediksi yang valid di masa depan, namun kerangka konseptual ini adalah sebuah usaha membangun demokrasi yang lebih bermartabat melalui pemimpin politik yang demokratis. Jika psikologi moral telah diaplikasikan di Amerika, sebuah negara dengan prinsip demokrasi yang cenderung stabil, maka Indonesia harus segera memulainya.

Prinsip demokrasi yang telah diterapkan oleh Indonesia membawa berbagai konsekuensi sosial yang positif, salah satunya kondisi dimana semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin politik. Namun, apa yang harus digunakan sebagai panduan strategis untuk memperoleh pemimpin yang membawa ideologi kesejahteraan rakyat? Apakah hal ini dapat dicapai dengan hanya menelitik *track record* pekerjaan; prestasi; gelar akademis dan kapasitas intelektual? Penulis justru melihat bahwa empat aspek ini tidak menjadi jaminan ukuran integritas seorang pemimpin politik.

Ketika individu menjadi seorang pemimpin politik, berbagai variabel, baik sosial, ekonomi bahkan psikologis hadir membayangi berbagai proses pengambilan keputusan yang harus dilalui olehnya. Oleh

karena itu, nilai dan emosi moral menjadi dua variabel yang harus diperhitungkan dalam isu kepemimpinan politik. Ketika individu menjadi seorang pemimpin politik, ia akan dibekali dengan berbagai perangkat kognitif yang siap untuk membawa prestasi, terdiri dari para ahli, birokrat dan profesional, seperti Gubernur dengan perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Presiden dengan para menteri dan staff ahlinya. Tugas seorang pemimpin adalah menentukan arah kemana perangkat kognitif ini akan berlabuh. Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi nahkoda yang memberikan arah tujuan yang tepat kemana sebuah kapal besar akan berlabuh.

Penutup

Saat ini berbagai kajian mengenai politik dan demokrasi di Indonesia mayoritas diwarnai oleh berbagai kajian ilmu politik dan hukum yang berbicara mengenai sistem demokrasi yang terbaik bagi Indonesia, misalnya sistem pemilihan umum langsung serentak, lelang jabatan di institusi pemerintah, revisi UU parpol dan lain sebagainya. Sedangkan kajian mengenai individu, kelompok dan perilaku masih menjadi materi yang minor untuk diaplikasikan. Padahal, ketika berbicara mengenai kondisi demokrasi, maka kita berbicara mengenai manusia sebagai individu yang menyelenggarakan demokrasi, kelompok yang berinteraksi serta perilaku yang kompleks. Maka seharusnya, psikologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari manusia secara komprehensif hadir dan memberikan sumbangsuhnya. Sumbangsih yang diberikan dapat berupa kajian-kajian empiris mengenai perilaku manusia (individu atau kelompok) dalam berbagai setting politik dan demokrasi.

Ketika kita berbicara mengenai politik dan demokrasi, mau tidak mau, kita harus

berbicara mengenai manusia dan segala aspek perilakunya yang terlibat. Berbagai isu politik dan demokrasi yang berkaitan dengan perilaku manusia antara lain kepemimpinan politik; perilaku memilih (*voting behavior*), strategi politik, komunikasi politik serta keputusan politik. Seluruh set aktivitas manusia dalam konteks politik dan demokrasi ini jelas merupakan aspek perilaku yang dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis seperti kognisi, emosi, sikap, kepribadian dan lain sebagainya. Bagaimana mengidentifikasi apa yang ada dalam "kepala" manusia ketika mereka berada dalam lingkungan politik? Disinilah peranan psikologi untuk memahaminya secara komprehensif. Ketika psikologi terlibat dan mampu mengidentifikasi pemimpin politik yang berkualitas, maka demokrasi di Indonesia akan tumbuh secara sehat. Usia 18 tahun yang tergolong belia dari sistem demokrasi Indonesia saat ini seharusnya menjadi momen emas dimana para ilmuwan, praktisi dan *stakeholders* terkait memikirkan psikologi sebagai ilmu yang diperhitungkan. Jika dalam kajian psikologi remaja secara umum, usia belia memang usia yang disebut sebagai masa krisis identitas, namun usia ini juga menjadi usia yang paling menentukan hidup manusia di masa yang akan datang (Santrock, 2014).

Daftar Pustaka

- Beerbohm, E. (2015). Is democratic leadership possible? *American Political Science Review*, 109(4), 639-652.
- Carney, D. R., Jost, J. T., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). The secret lives of liberal and conservatives: Personality profiles, interaction styles, and the things they leave behind. *Political Psychology*, 29(6), 807-840.
- Cohen, T. R., Wolf, S. T., & Panter A. T., & Insko, C. A. (2011). Introducing the

- GASP Scale: A new measure of guilt and shame proneness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 100(5), 947-966.
- Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (2008). *Social cognition: From brains to culture*. NY: McGraw-Hill.
- Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., & Ditto, P. H. (2011). Mapping the moral domain. *Journal of Personality and Social Psychology*. doi: 10.1037/a0021847.
- Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist model approach to moral judgment. *Psychological Review*, 108(4), 814-834.
- Haidt, J. (2003). The emotional dog does learn new tricks: A reply to Pizarro and Bloom (2003). *Psychological Review*, 110(1), 197-198.
- Haidt, J. (2012). *The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion*. NY: Pantheon Books.
- Hanan, D. (2015, Mei 25). Parpol dan persepsi publik. *www.saifulmujani.com*. Diunduh dari <http://www.saifulmujani.com/blog/2015/05/25/parpol-dan-persepsi-publik>
- Hofmeister, W., & Grabow, K. (2011). *Political parties: Functions and organization in democratic societies*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Lewin, K. (1950). The consequences of an authoritarian and democratic leadership. Dalam A. W. Gouldner (Ed.), *Studies in leadership: Leadership and democratic action* (pp.409-417). New York: Russell & Russell.
- Russell, J. A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion. *Psychological Review*, 110(1), 145-172.
- Santrock, J. W. (2014). *Life span development 15th.ed.* McGraw-Hill Education.
- Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1). doi: 10.9707/2307-0919.1116
- Tangney, J. P., & Salovey, P. (2010). Emotions of the imperiled ego. Dalam Maddux, J. P., & Tangney, J. P. *Social psychological foundations of clinical psychology* (pp. 245-271). London: The Guilford Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (tt). Diunduh dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Weber, E. T. (2010). Democratic political leadership. Dalam *Political and civic leadership* (pp.105-110). Washington D. C.: Sage Press.